

SINOPSIS

Perkembangan teknologi secara global dan dimasyarakat yang berkembang begitu pesat menuntut pemerintah untuk menyesuaikan perkembangan teknologi ini dan memanfaatkannya dalam mengelola praktik pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Oleh karena itu pemerintah mencoba untuk merealisasikannya melalui Inpres No 3 Tahun 2003 tentang *e-Government*. *E-Government* adalah suatu konsep pemerintahan yang dikembangkan melalui pemanfaatan media elektronik sebagai sarana untuk berinteraksi dengan masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, menciptakan ketransparanan pemerintah dan sebagai upaya untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan-pelayanan yang dilakukan untuk masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek dan atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Sedangkan lokasi penelitian mengambil tempat di Dishubkominfo sebagai pengelola *e-Government* Pemerintah Provinsi DIY

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan *e-Government* pada Pemerintah Provinsi DIY di implementasikan melalui blueprint *jogja cyber province* sebagai inisiatif yang dikembangkan guna mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan interaksi satu dengan yang lainnya, dan selanjutnya diharapkan dapat berfungsi sebagai akselerator dalam upaya peningkatan taraf hidup dan daya saing yang sangat ketat. Pengembangan *e-Government* pada pemerintah provinsi Melalui *Jogja Cyber Province* DIY dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari mengembangkan semua sarana dan prasarana yang diperlukan guna berjalanya *e-Government* di DIY. Pengembangan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY adalah dengan mengembangkan Akses melalui jaringan-jaringan komputer dan internet, mengembangkan Portal pelayanan publik melalui *Digital Government Service* (DGS) yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat saat ini, Infrastruktur dan Aplikasi dasar juga dikembangkan dalam implementasi *e-Government* di Pemerintah Provinsi DIY melalui pengembangan *hardware* dan *software* serta penyusunan aplikasi dasar *e-Government* dan aplikasi-aplikasi lain serta mengembangkan SDM yang ada dengan pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan.

Saran untuk organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi diplaza informasi sebaiknya cepat dibangun sistem pencarian informasi secara elektronik sehingga pengambilan informasi ke daerah-daerah lain khususnya dijogja bisa cepat. Untuk Pemerintah Daerah sebaiknya tidak memutasi staff-staff yang ada di LTMI dan MIPI untuk di pindah tugaskan secara cuma-cuma tanpa memberikan pengganti yang sepadan karena penggantian kepada staff khususnya staff yang sudah memiliki peran khusus dalam kerjanya akan seperti dalam hal TI akan mengganggu kinerja pada LTMI dan MIPI sebagai pengelola *e-Government* Pemprov DIY.